



**Penerapan Objektivitas Pemberitaan Konflik Keistimewaan  
Yogyakarta di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat**

**SUMMARY SKRIPSI**

**Untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan**

**Pendidikan Strata 1**

**Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

**Penyusun**

**Nama : Nurul Latifatun Nisa**

**NIM : D2C007065**

**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2011**

## 1. PENDAHULUAN

Media massa berfungsi sebagai pemberi informasi yang terjadi dan berkaitan dengan kepentingan publik. Media massa yang merupakan sarana pemenuhan kebutuhan informasi manusia saling berkaitan. Menurut Mc Luhan (Rakhmat, 1994: 224) media massa merupakan perpanjangan indera kita. Melalui media massa kita mendapat informasi kasat mata seperti benda, manusia, bahkan tempat yang tidak kita alami secara langsung.

Media massa menampilkan realitas yang menjadi tangan kedua berupa informasi sosial, politik, ekonomi, dan lainnya. Keterbatasan masyarakat dalam menyerap informasi dihadapkan pada geografis yang kondusif atau tidak. Berita menjadi tersebar luas dan cepat diketahui. Melalui sisi lain media massa, konflik yang terjadi diberitakan media massa sebagai bagian yang layak untuk digali dan lebih ditonjolkan. Berita yang layak jual mampu mengangkat keingintahuan publik.

Konflik seputar monarki kepemimpinan politik Yogyakarta itu berawal dari pernyataan Presiden SBY pada tanggal 26 November 2010 saat Sidang Kabinet Terbatas. "Tidak boleh ada sistem monarki yang bertabrakan dengan konstitusi maupun nilai-nilai demokrasi," kata Presiden Yudhoyono. Pernyataan Presiden yang mempersoalkan Keistimewaan Yogyakarta ini ternyata memicu ketidaksetujuan warga Yogya. Ketidaksetujuan terfokus pada Pasal 11 draft RUU, misalnya, menempatkan Sultan Hamengkubuwono X dan Paku Alam hanya sebagai simbol dan penjaga budaya serta pemersatu warga Yogyakarta. Sedangkan kepala pemerintahan, yaitu Gubernur dan wakil Gubernur, dipilih sesuai perundang-undangan.

Polemik seputar Rancangan Undang-undang (RUU) Keistimewaan Yogyakarta masih bergulir. Unjuk rasa mempertanyakan sejumlah pasal krusial dalam draft RUU tersebut terus berlangsung. Padahal Keistimewaan Yogyakarta sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 18B UUD 1945 disebutkan bahwa *“negara untuk mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”*

Berita konflik tersebut mendapatkan banyak perhatian dari khalayak luas dan media cetak terutama surat kabar di Indonesia baik skala nasional maupun daerah. Menurut aneahira.com (Ahira, 2008), di Indonesia surat kabar lokal yang masih “setia” dengan lingkup kedaerahannya adalah Kedaulatan Rakyat. Koran ini lahir dan tumbuh di Yogyakarta. Berbekal kebudayaan yang sudah sangat identik dengan Yogyakarta. Kedaulatan Rakyat seolah mendapatkan jalan mulus untuk “meluncurkan” aksi-aksi kedaerahannya.

Berdasar pengamatan awal peneliti, beberapa berita di Kedaulatan Rakyat terkait yang terlihat dalam kutipan di bawah ini pemberitaan terlanjur terlihat berat sebelah. Seperti terlihat pada paragraf berita headline tanggal 1 Desember 2010 berjudul: “SBY Menyinggung Emosi Yogya”.

*Judul: SBY Menyinggung Emosi Yogya*

*Ditanya tentang penolakan dari masyarakat Yogya atas draf RUU ini, Mendagri mengatakan di internal pemerintah tak ada perdebatan. “Sebenarnya suasana di luar saja yang panas. Itu suara yang terekam, yang tidak terekam banyak ha.. ha.. ha.. Berapa persen yang menolak. Begini ya, kita belum memutuskan itu,” ucapnya.*

Pemberitaan bernada sama muncul kembali pada tanggal 2 Desember 2010 saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memuat jumpa pers guna menjelaskan mengenai kata-katanya tentang isu Keistimewaan Yogyakarta beberapa waktu lalu serta mengenai hasil rapat kabinet paripurna mengenai draf RUU Keistimewaan Yogyakarta.

Beberapa surat kabar di Indonesia menjadikan bahan fakta ini sebagai headline di hari berikutnya (3 Desember 2010). Kedaulatan Rakyat memuat headline berjudul “Pemerintah ‘Ngotot’ Pemilihan”. Kedaulatan Rakyat menggunakan judul headline dengan kata slang “ngotot” yang bisa digambarkan sebagai keadaan bersitegang atau melakukan argumen yang disertai emosi yang didasarkan pada subjektivitas.

Hal yang menarik, sisi emosional yang muncul pada Kedaulatan Rakyat tidak tampak secara eksplisit pada surat kabar lain memberitakan kejadian yang sama. Contohnya Suara Merdeka yang merupakan koran daerah Jawa Tengah memuat headline pada berjudul “Gubernur DIY Lewat Pilkada”. Tidak ditemukan kata-kata emosional disini. Pilihan judul berita berdasarkan fakta hasil rapat paripurna yang dipimpin oleh Presiden. Pada hari yang sama, Kompas juga menjadikan momen siaran penjelasan Presiden sebagai headline berjudul “Pemerintah Usul Gubernur Dipilih”. Kompas mengambil beberapa narasumber yang dijaga agar berimbang jumlah dan perspektifnya Kompas memberitakan kejadian ini dengan berusaha netral dan objektif. Terbukti dengan pilihan kata “usul” yang dijadikan predikat kalimat dalam judul headline menggambarkan sikap pemerintah yang bisa diajak kompromi dan musyawarah.

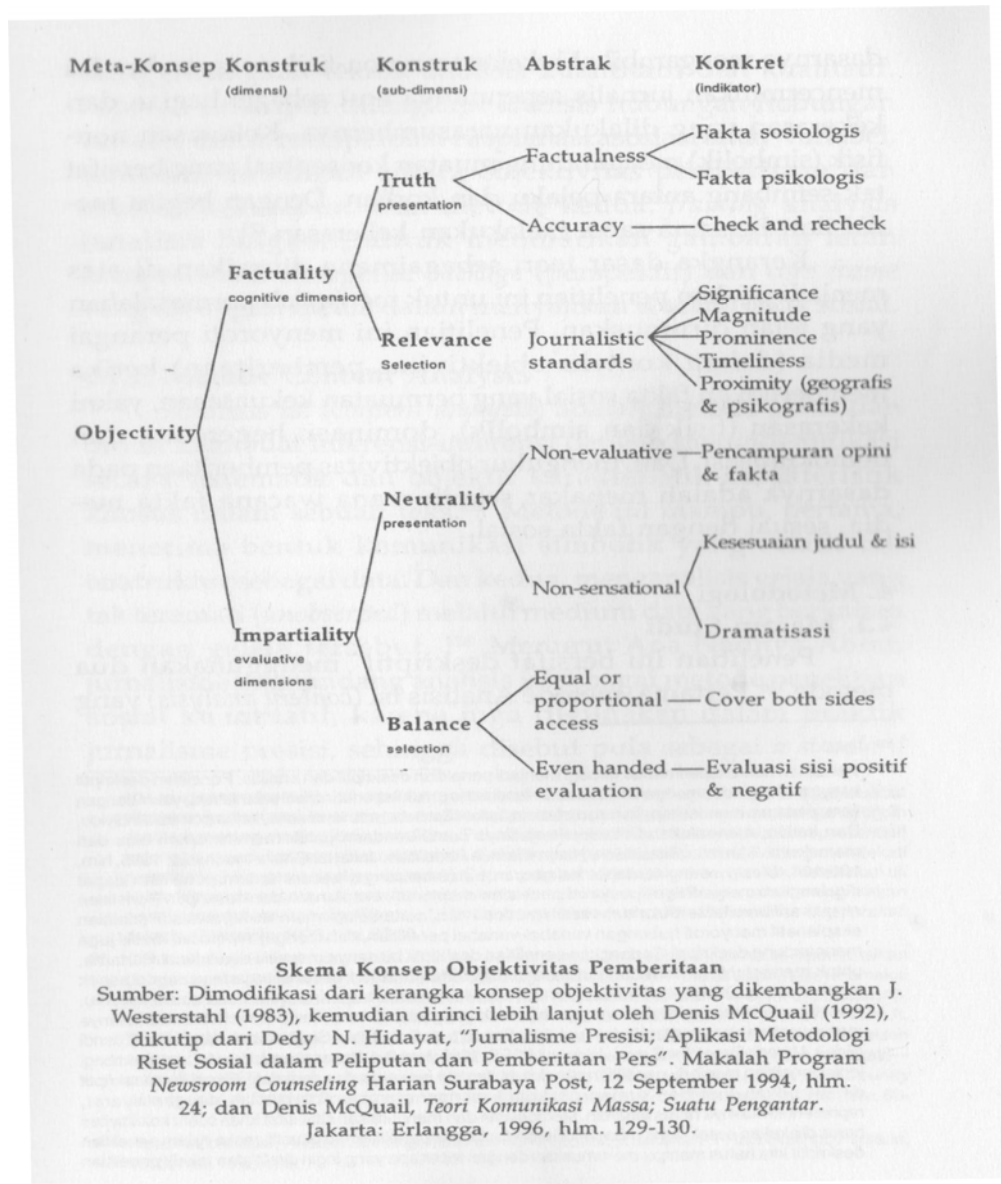
Hasil perbandingan awal dari surat kabar lain terlihat perbedaan mencolok yakni Kedaulatan Rakyat masih membawa aspek emosional dalam menyampaikan berita mengenai konflik Keistimewaan DIY seperti yang di sampaikan Ahira sebelumnya.

Menggunakan metode analisis isi, peneliti dapat menganalisis seluruh isi pesan yang ada dalam pemberitaan konflik Keistimewaan Yogyakarta di Kedaulatan Rakyat secara sistematis, objektif dan kuantitatif dengan bantuan dua orang koder lainnya. Ambang batas uji reabilitas adalah 0,75 dan unit analisis penelitian ini adalah keseluruhan berita terkait konflik Keistimewaan Yogyakarta di Kedaulatan Rakyat pada halaman depan. Mengingat dalam sistem media memiliki keanekaragaman eksternal yang berarti terdapat sejumlah media alternatif dalam suatu masyarakat, terbuka kesempatan untuk penyajian informasi yang memihak. Dimana menurut McQuail, hanya sedikit (kalaupun ada) media – apa pun tujuan dan pernyataan dirinya-yang dapat terbebas sepenuhnya dari tuduhan bahwa media itu tidak sepenuhnya objektif. (McQuail, 1987: 131).

## **2. PEMBAHASAN**

Menurut McQuail objektivitas pers dalam sistem media memiliki keanekaragaman eksternal, terbuka kesempatan untuk memihak, meskipun info tersebut harus bersaing dengan sumber info lain yang menyatakan dirinya objektif. (Mc Quail, 1996: 130). Sedangkan objektivitas pemberitaan sendiri adalah penyajian berita yang benar, tidak berpihak dan berimbang (Siahaan, 2001: 100).

## Skema Kerangka Objektivitas



(dalam Siahaan, 2001: 69)

Melalui proses koding dan skoring didapatkan deskripsi menyeluruh mengenai objektivitas pemberitaan konflik Keistimewaan Yogyakarta pada surat kabar Kedaulatan Rakyat sebagai berikut:

Tabel 1  
Objektivitas Pemberitaan

No	Dimensi	Kategori	Indikator	Operasional	Poin
1	Factuality	Truth	Factualness	• Fakta sosiologis	63%
				• Fakta Psikologis	37%
			Accuracy	• Dapat dilakukan cek &recheck	100%
				• Tidak dapat dilakukan cek &recheck	0%
		Relevance	Nilai berita	• Significance	97%
				• Magniitude	11%
				• Proximineace	84%
				• Timeliness	85%
				• Proximity	100%
				• Px Geografis	58%
• Px Psikografis	42%				
2	Impartiality	Neutrality	Pencampuran fakta dan opini	• Ada pencampuran fakta & opini	26%
				• Tidak ada pencampuran fakta & opini	74%
			Kesesuaian judul dengan isi	• Judul & isi sesuai	100%
				• Judul & isi tidak sesuai	0%
		Dramatisasi	• Ada dramatisasi	44%	
			• Tidak ada dramatisasi	56%	
		Balance	Cover both sides	• Cover both sides	60%
				• Tidak cover both sides	40%
			Even-handed Evaluation	• Penilaian sisi positif-negatif seimbang	51%
				• Penilaian sisi positif-negatif tidak seimbang	49%

Tabel 1 menunjukkan hasil presentase objektivitas pemberitaan Konflik Keistimewaan Yogyakarta di Kedaulatan Rakyat. Dimana objektivitas pemberitaan dirumuskan dengan dua dimensi. Dimensi *Factuality* dengan Kategori *Truth (Factualness & Accuracy)* dan Kategori *Relevance*. Dimensi kedua yakni Dimensi *Impartiality* berisi kategori *Neutrality* (percampuran fakta & opini, kesesuaian judul dengan isi, dramatisasi) dan kategori *Balance (cover both sides & even handed-evaluation)*.

Tabel 2  
Tingkat Objektivitas Pemberitaan

Kategori	Kedaulatan Rakyat	
	F	%
Objektivitas Tinggi (7-8)	22	36%
Moderat (5-6)	33	53%
Rendah (3-4)	7	11%
Total	62	100%

Hasil penghitungan ditemukan poin riil terendah 3 dan tertinggi 8. Tabel 2 menunjukkan objektivitas pemberitaan konflik Keistimewaan Yogyakarta di Kedaulatan Rakyat lebih ke arah moderat saja. Kedaulatan Rakyat yang memiliki terkenal memiliki *emotional bonding* kuat dengan wilayah Yogyakarta, baik pada pemerintah maupun rakyatnya, masih berusaha menyajikan berita dengan sisi objektivitas. Tingkatan moderat menggambarkan Kedaulatan Rakyat masih setengah hati menjalankan kaidah jurnalistik dibidang objektivitas.



Kedekatan dengan lingkungan sekitar menjadikan Kedaulatan Rakyat mempunyai objektivitas rendah dan berat sebelah dengan persentase 11% sejumlah 7 berita. Di sisi lain, sebagai institusi pers Kedaulatan Rakyat berusaha sebisa mungkin menerapkan objektivitas meski yang berkonflik adalah daerahnya dengan pusat. Terbukti dengan perolehan tingkat objektivitas tinggi yang mencapai persentase 36% dan hasilnya lebih besar dari pada sisi objektivitas rendah.

### **3. KESIMPULAN**

- 1 Pemberitaan mencapai titik objektivitas terendah ketika membahas mengenai prosedur kewenangan berupa metode pemilihan atau penetapan Gubernur Yogyakarta. Sebagai contoh berupa lampiran berita No. 29 (Presiden Paksakan Gubernur Utama), jurnalis Kedaulatan Rakyat lebih menyoroti pada keputusan sementara Presiden untuk membuat jabatan baru bagi Sultan nantinya, yakni Gubernur Utama. Pemberitaan menegaskan pada proses penyerahan draf yang menjadi polemik di antara anggota DPR pihak pro dan kontra.
- 2 Presentase yang termasuk pada objektivitas moderat mencapai 53%. Secara umum, Kedaulatan Rakyat dalam kategori ini lemah pada dimensi *Impartiality* kategori *Balance*. Meskipun tidak semuanya, jurnalis sering gagal dalam mengcover kedua pihak sekaligus memberi evaluasi yang seimbang antara positif dan negatif. Kedaulatan Rakyat

lebih kuat di dimensi *Factualness* dalam memberitakan konflik Keistimewaan Yogyakarta. Disini terlihat Kedaulatan Rakyat memang masih setengah hati menjalankan tugasnya sebagai lembaga pers yang wajib menjaga objektivitas

- 3 Pemberitaan yang mendapat poin objektivitas tertinggi (8) adalah saat semua indikator objektivitas terpenuhi. Yakni pemberitaan yang menyiratkan dukungan oleh banyak pihak untuk melakukan penetapan Gubernur DIY dibanding pemilihan. Pada poin 7, meski masuk kategori objektivitas tinggi, jurnalis menggunakan fakta psikologis sebagai bahan baku berita yang berupa interpretasi subjektif terhadap fakta kejadian. Selain itu, jurnalis KR dalam kategori ini masih melakukan dramatisasi dan tidak melakukan evaluasi positif dan negatif secara seimbang.
- 4 Pemberitaan Kedaulatan Rakyat difokuskan pada penyerahan draf RUUK DIY dan menjadi terihat berpihak pada Yogya saat membahas poin penting dari penetapan. Baik dari kronologi awal yakni Rapur DPRD DIY, hasil sementara dari pemerintah yang mengajukan poin Gubernur Utama, serta sikap rakyat yang mendukung penetapan dengan diperkuat oleh besaran angka berarti. Penetapan merupakan esensi Keistimewaan yang diperjuangkan oleh Yogyakarta dalam menetapkan Gubernur DIY.
- 5 Pemberitaan surat kabar Kedaulatan terkait konflik Keistimewaan Yogyakarta dapat dikatakan menuju satu sikap yaitu mendukung proses RUUK DIY dengan sistem penetapan untuk Gubernur dan

Wakil Gubernur Yogyakarta. Kedaulatan Rakyat melihat bahwa konflik Keistimewaan Yogyakarta akan menemui titik temu saat Juni – Juli 2011. Yakni ketika ada keputusan akhir dan pengesahan draf Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta dari DPR RI.

#### **4. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

McQuail, Dennis. 1996. *Teori Komunikasi Massa : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga

Rakhmat, Jalaluddin. 1993. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: CV. Remaja Karya

Siahaan, Hotman M. dkk. 2001. *Pers yang Gamang: Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor Timur*. Surabaya: Lembaga Studi Perubahan Sosial

##### **Internet**

Ahira. 2008. Koran Kedaulatan Rakyat dan Unsur Kedaerahan. Diakses tanggal 9 Januari 2011. Tersedia pada [<http://www.anneahira.com/koran-kedaulatan-rakyat.htm>]

# **PENERAPAN OBJEKTIVITAS PEMBERITAAN KONFLIK KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA DI SURAT KABAR KEDAULATAN RAKYAT**

## **Abstrak**

Media massa merupakan institusi pers yang wajib menjalankan kaidah jurnalistik secara seksama. Salah satu contohnya adalah media massa dituntut untuk menyajikan berita secara objektif. Objektivitas berupa standar penyajian agar berita yang dihasilkan faktual dan seimbang. Objektivitas menentukan kualitas informasi dan kredibilitas media massa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penerapan objektivitas pemberitaan konflik Keistimewaan Yogyakarta di surat kabar Kedaulatan Rakyat mulai tanggal 27 November 2010 sampai 1 Februari 2011. Pendekatan yang dilakukan peneliti berupa metode analisis isi kuantitatif dengan dua dimensi objektivitas dari Westerstahl (1983) yang kemudian dirinci oleh Denis McQuail (1992). Yakni, dimensi *Factuality* dan dimensi *Impartiality*.

Hasil penelitian ini menunjukkan surat kabar Kedaulatan Rakyat yang masih setengah hati menjalankan fungsinya sebagai lembaga pers dengan persentase 53%. Ditemukan Kedaulatan Rakyat yang dalam kategori moderat masih mengabaikan mengenai evaluasi positif dan negatif, melakukan dramatisasi, dan interpretasi subjektif jurnalis sebagai bahan baku berita.

Sedangkan objektivitas rendah adalah pada berita yang memiliki skoring 3-4 sejumlah 11%. Untuk hasil skoring 3, pada lampiran berita No. 29 (Presiden Paksakan Gubernur Utama), jurnalis Kedaulatan Rakyat lebih menyoroti pada keputusan sementara Presiden untuk membuat jabatan baru bagi Sultan nantinya, yakni Gubernur Utama. Pemberitaan menegaskan pada proses penyerahan draf yang menjadi polemik di antara anggota DPR pihak pro dan kontra.

Objektivitas tinggi (7-8) sejumlah 36%. Pemberitaan yang mendapat poin objektivitas tertinggi (8) adalah saat semua indikator objektivitas terpenuhi. Yakni pemberitaan yang menyiratkan dukungan oleh banyak pihak untuk melakukan penetapan Gubernur DIY dibanding pemilihan. Pada poin 7, meski masuk kategori objektivitas tinggi, jurnalis menggunakan fakta psikologis sebagai bahan baku berita yang berupa interpretasi subjektif terhadap fakta kejadian. Selain itu, jurnalis Kedaulatan Rakyat dalam kategori ini masih melakukan dramatisasi dan tidak melakukan evaluasi positif dan negatif secara seimbang.

*Key Words:* Pemberitaan; Analisis Isi; Objektivitas; Kedaulatan Rakyat

## **THE OBJECTIVITY OF REPORTING YOGYAKARTA'S SPECIAL STATUS CONFLICT IN *KEDAULATAN RAKYAT***

### **Abstract**

The mass media is an institution that must run press journalism rules carefully. As one example is the mass media are required to present the news objectively. Objectivity as the standard for the presentation of the news produced factual and balanced. Objectivity determine the quality of information and mass media credibility. This research was conducted to determine the application of objectivity in reporting Yogyakarta's Special Status conflict in *Kedaulatan Rakyat* starting November 27th, 2010 until February 1st, 2011. The researcher using a method of quantitative content analysis with two-dimensional objectivity of Westerstahl (1983) which is then broken down by Denis McQuail (1992). Namely, the dimension of Factuality and the dimension Impartiality.

The results showed that *Kedaulatan Rakyat* are still reluctant to function as a press agency with the percentage of 53%. In the moderate category are still ignoring the positive and negative evaluations, conduct dramatization, and subjective interpretation as raw material for news journalists.

Then the low category of objectivity is having 11% scoring 3-4. For the scoring 3, in appendix No. 29 (Presiden Paksakan Gubernur Utama), journalists highlighted over the decision as president to create new positions for the Sultan later, the Gubernur Utama. Coverage confirmed in the process of submitting draft being debated among members of parliament by the pro and cons.

The high category of objectivity (7-8) got 36% in total. The highest points (8) when all indicators of objectivity is fulfilled. That is the news that imply support by many parties to make the determination of Governor of DIY than the election. On point 7, although it is in the category of high objectivity, journalists use the psychological facts as raw materials in the form of news that the subjective interpretation of the facts of the situation. In addition, *Kedaulatan Rakyat's* journalist in this category still doing the dramatization and not conduct a balance evaluations.

**Key Words:** Reporting; Content Analysis; Objectivity; *Kedaulatan Rakyat*